



PENGARUH DIMENSI BUDAYA NASIONAL TERHADAP RISIKO *FRAUD* (Studi Empiris pada 94 Negara)

Monika Alfarin, Wahyu Meiranto ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The increase of fraud cases constantly becomes a crucial problem for enterprises in the world. Anti-fraud program on companies needs holistic fraud risk input to be effective and efficient. Culture as an aspect of life is affecting every society. Then, the purpose of this research is to analyze the effect of culture on fraud risk. National culture dimension from Hofstede's theory is used in this research. Dimensions that tested are power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long-term orientation, and indulgence. The fraud risk is proxied by Corruption Perceptions Index 2020 (CPI 2020). Data population is 94 countries that had culture dimension and CPI 2020 measured. Data that had earned then tested with multiple linear regression method. The result of this research shows that power distance and masculinity give positive effect on fraud risk. On the other hand, long-term orientation, individualism, and indulgence dimension give negative effect to fraud risk.

Keywords: Fraud Risk, National Culture Dimension Hofstede, Fraud Triangle, Fraud Prevention

PENDAHULUAN

Perusahaan memiliki sumber daya seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang digunakan dalam usaha memperoleh pendapatan. Kinerja dan keadaan sumber daya perusahaan perlu dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya. Sebagai penjamin kualitas, laporan keuangan perlu diaudit untuk mendapat *reasonable assurance* apakah laporan keuangan tidak mengandung eror atau *fraud* (Tuanakotta, 2015). Apabila hasil audit menunjukkan adanya tanda-tanda terjadinya *fraud*, maka perusahaan perlu menggunakan jasa akuntan forensik untuk menginvestigasi kasus tersebut.

Fraud adalah masalah dunia. Setiap perusahaan di belahan dunia memiliki risiko *fraud*. Menurut *Report to the Nation 2020*, perusahaan yang ada di dunia kehilangan kira-kira 5% dari penapatannya karena *fraud*. Terdapat 2.504 kasus *fraud* yang dikumpulkan dari 125 negara dengan rata-rata kerugian per kasusnya US\$ 1.509.000. Sebanyak 44% kasus *fraud* terjadi di perusahaan privat, 26% perusahaan publik, 16% pemerintahan, 9% perusahaan non-profit, dan 5% jenis perusahaan lainnya. Bisnis ukuran kecil justru memiliki risiko *fraud* yang lebih besar, seperti risiko penagihan palsu, perhitungan penggajian palsu, serta cek & pembayaran palsu (ACFE, 2020).

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling umum terjadi di setiap negara. Korupsi merupakan salah satu kategori besar selain penyalahgunaan aset dan *fraud* laporan keuangan, berdasarkan taksonomi ACFE. Skema korupsi bervariasi sebesar 38% pada organisasi kecil (<100 pegawai) dan 47% pada organisasi besar (>100 pegawai). Korupsi melibatkan kerjasama antara dua atau lebih pihak. Di tahun 2020, dari 2.504 kasus, 43 persennya adalah korupsi dengan nilai median kerugiannya adalah US \$ 200.000 (ACFE, 2020).

Pencegahan *fraud* merupakan tindakan paling *cost-effective* dalam melawan *fraud* (Mihret, 2014). Pihak manajemen perusahaan membuat program pencegahan *fraud*, umumnya disebut sebagai program anti-*fraud*. Program ini berkaitan dengan kegiatan

¹ Corresponding author



membangun budaya kerja yang jujur, mengimplementasi kebijakan untuk mengurangi risiko *fraud*, dan membangun proses *monitoring* yang efektif. Adanya program pencegahan yang kuat dapat memberikan keyakinan kepada manajemen dan pihak eksternal lainnya (Singleton & Singleton, 2010).

Sebelum mengembangkan program anti-*fraud*, perlu dilakukan pengukuran risiko. Pengukuran risiko yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagian mana dari perusahaan yang lebih rawan terkena *fraud*. Menurut Singleton & Singleton (2010), pengukuran risiko merupakan penentu keberhasilan program anti-*fraud*. Pengukuran risiko yang menyeluruh dapat memberikan dasar pertimbangan kepada manajemen dalam menyusun kebijakan. Oleh sebab itu, semakin tepat risiko *fraud* diukur dalam perusahaan maka semakin tepat perusahaan dapat mencegah praktik tersebut.

Fraud merupakan tindakan ketidakjujuran. Menurut Albrecht *et al.* (2012), tindakan *fraud* ditentukan oleh perkembangan moral individu pelakunya. Budaya mempengaruhi pemikiran, perilaku, dan pandangan hidup seseorang terhadap dunia. Hal ini disebabkan budaya adalah serangkaian ide umum, kepercayaan, dan nilai yang dibagikan oleh anggota dari suatu kelompok individu (House *et al.*, 2002). Individu yang berada dalam lingkungan budaya jujur dan etika tinggi akan merasa tertahan untuk berbuat curang (Kaptein & Schwartz, 2008). Oleh karena itu, terdapat kaitan antara budaya dan keterjadian *fraud*.

Pemahaman budaya dalam pengukuran risiko *fraud* dapat memberikan sudut pandang baru bagi perusahaan. *Input* budaya dalam proses pengukuran risiko *fraud* di perusahaan belum banyak dilakukan (Mihret, 2014). Pengukuran yang lebih menyeluruh dapat memberikan gambaran lebih sempurna mengenai keadaan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dimensi budaya nasional terhadap risiko *fraud*. Risiko *fraud* diprosksikan dengan *Corruption Perception Index* (CPI) 2020. CPI 2020 diambil dari *website* resmi *Transparency International*. CPI merupakan indeks pengukuran terpercaya dengan jangkauan yang luas. Pada 2021, *Transparency International* berhasil mengukur CPI dari 180 negara (*Transpsrency International*, diakses pada 30 April 2021). Gagasan dibalik penggunaan proksi ini adalah bahwa CPI mampu menggambarkan risiko *fraud* secara umum dan global. Korupsi merupakan skema *fraud* yang paling umum terjadi di negara-negara di dunia (ACFE, 2020). Indeks CPI berkisar dari 0-100 dan mengukur dengan satuan per negara sehingga sebanding dengan indeks dimensi budaya nasional Hofstede.

Penelitian akademik mengenai *fraud* dapat membantu praktisi dalam mengembangkan program anti-*fraud* yang lebih presisi. Dengan mempertimbangkan masukan faktor budaya, praktisi dapat memahami alasan seseorang melakukan *fraud*. Program pencegahan *fraud* memerlukan pemahaman *fraud* yang lengkap dan mendalam sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Berkaitan dengan manfaat yang diberikan, penelitian ini penting untuk dilakukan.

Struktur penulisan jurnal ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian selanjutnya adalah kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis. Bagian ketiga adalah metode penelitian termasuk model regresi spesifik. Bagian keempat menjelaskan hasil dan diskusi penelitian. Bagian terakhir adalah kesimpulan penelitian.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Risiko berasal dari ketidakpastian yang telah diprediksi dan diperhitungkan sebelumnya (Sunyoto & Harisa, 2017). *Fraud* merupakan tindakan kriminal yang melawan hukum, dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok dan secara langsung/tidak langsung merugikan pihak lain (Pusdiklatawas BPKP, 2002). *Fraud*

merupakan jenis kejahatan kerah putih yang banyak terjadi di tempat kerja (Sutherland, 1940). ACFE menyatakan bahwa 97% pelaku *fraud* berasal dari internal perusahaan (ACFE, 2020).

Donald R. Cressey pada tahun 1950 mengembangkan teori segitiga *fraud*. Teori ini menjelaskan alasan seseorang melakukan *fraud*. Cressey menemukan 3 alasan yang divisualisasikan membentuk 3 sisi segitiga, yaitu: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan mengacu pada situasi di mana orang berpikir mereka harus melakukan *fraud*. Misalnya, situasi terlilit utang, kebutuhan hidup tidak terduga, hidup di luar batas kemampuan, dll. Kesempatan mengacu pada situasi di mana seseorang percaya ada kombinasi keadaan yang diinginkan sehingga *fraud* yang dilakukan tidak akan terdeteksi. Misalnya, kelemahan kontrol perusahaan. Rasionalisasi merupakan alasan yang dibuat oleh pelaku *fraud* untuk membenarkan dan memuaskan tindakannya yang salah. Misalnya, pelaku mengambil kas perusahaan dan berjanji pada dirinya sendiri untuk mengembalikannya begitu ia punya uang (Cressey, dalam Singleton & Singleton, 2010).

Upaya perlawanan terhadap *fraud* sudah dimulai sejak waktu yang lama. Akademisi dan peneliti berkontribusi mengembangkan teori-teori untuk melawan *fraud*. Teori-teori tersebut membantu penyusunan program anti-*fraud* dalam pencegahan, pendeteksian, dan investigasi *fraud*. Pencegahan *fraud* dinilai sebagai strategi yang paling *cost-effective* (Mihret, 2014).

Seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, *fraud* merupakan tindakan ketidakjujuran. Perkembangan moral, etika, dan hati nurani menentukan tindakan *fraud* (Albrecht *et al.*, 2012; Nettler, 1984; Singleton & Singleton, 2010). Lingkungan juga mempengaruhi keterjadian *fraud*. Lingkungan kerja yang jujur dan etika tinggi dapat menahan seseorang untuk berbuat curang (Kaptein & Schwartz, 2008; Singleton & Singleton, 2010). Moral, etika, dan hati nurani dipengaruhi secara langsung oleh budaya. Budaya merupakan nilai, ide umum, dan kepercayaan yang dibagikan antar anggota dalam suatu kelompok (House *et al.*, 2002).

Risiko *fraud* perlu diteliti secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran lengkap perusahaan. Gambaran yang tepat mengenai risiko *fraud* perusahaan menjadi masukan baik untuk perumusan program anti-*fraud*. Belum banyak penelitian yang memasukkan *input* budaya dalam menilai risiko *fraud*. Budaya mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Teori dimensi budaya nasional oleh Hofstede banyak digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan topik budaya. Teori ini membantu dalam membandingkan budaya negara-negara melalui indeks yang disediakan. Nilai indeks pada setiap negara melambangkan efek budaya terhadap perilaku anggotanya (Hofstede *et al.*, 2010).

Nilai-nilai budaya dapat dilihat dari enam dimensi. Dimensi yang dimaksud adalah dimensi *power distance*, *individualism*, *masculinity*, *uncertainty avoidance*, *long-term orientation*, dan *indulgence*. Setiap budaya negara dilihat dari enam dimensi, sehingga memiliki enam nilai (apabila lengkap). Nilai indeks berkisar antara 0-100 di mana nilai 0 adalah yang terendah dan nilai 100 adalah nilai tertinggi.

Power distance didefinisikan sebagai sejauh mana anggota lembaga/organisasi tanpa kekuasaan di suatu negara menerima atau mengharapkan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Kekuasaan selalu tidak merata dalam setiap lingkungan. Dimensi ini menunjukkan respon terhadap perbedaan kekuasaan tersebut. Nilai 100 menunjukkan bahwa anggota kelompok budaya menerima dengan baik hirarki kekuasaan. Nilai 0 menunjukkan bahwa anggota kelompok budaya menganggap hirarki kekuasaan hanya untuk memudahkan saja, bukan untuk menunjukkan kekuasaan (Hofstede *et al.*, 2010).

Individualism mengacu pada masyarakat di mana ikatan antar individu longgar, setiap orang harus menjaga dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Lawan dari *individualism* adalah *collectivism*. *Collectivism* mengacu pada masyarakat di mana individu dilahirkan dan

diintegrasikan ke dalam kelompok yang kuat dan terorganisir, individu menjaga satu sama lain dengan imbalan kesetiaan. Nilai 100 menunjukkan *individualism* yang tinggi. Sedangkan nilai 0 menunjukkan *collectivism* yang tinggi (Hofstede *et al.*, 2010).

Dimensi *masculinity* menunjukkan pandangan tujuan hidup. Lingkungan budaya maskulin menganggap bahwa tujuan hidup adalah kesuksesan materiil dan ditunjukkan dengan ambisiusitas. Sedangkan lingkungan budaya feminin menganggap tujuan hidup adalah kualitas hidup dan ditunjukkan dengan usaha menyeimbangkan hidup dan pekerjaan. Nilai 100 menunjukkan lingkungan budaya maskulin. Sedangkan nilai 0 menunjukkan lingkungan budaya feminin (Hofstede *et al.*, 2010).

Uncertainty avoidance didefinisikan sebagai sejauh mana anggota komunitas budaya merasa terancam oleh situasi yang ambigu atau asing. Nilai 100 menunjukkan bahwa lingkungan budaya merasa terancam dengan situasi asing. Sedangkan nilai 0 menunjukkan lingkungan budaya tidak merasa terancam dengan situasi asing. Biasanya, budaya dengan *uncertainty avoidance* yang tinggi mencari perlindungan dengan membuat peraturan dan hukum tertulis (Hofstede *et al.*, 2010).

Long-term orientation dapat dijelaskan sebagai memelihara kebajikan menuju imbalan masa depan, yaitu keberlanjutan dan sikap ekonomi. Ciri-ciri budaya yang memiliki *long-term orientation* yang tinggi: hemat, upaya berkelanjutan meski hasil lambat, menghargai keadaan, dll. Dimensi ini melihat apakah dalam pembuatan keputusan, budaya tersebut memasukkan pemikiran masa depan atau tidak. Nilai 100 menunjukkan orientasi tinggi terhadap masa depan. Sedangkan nilai 0 menunjukkan orientasi tinggi pada masa sekarang (Hofstede *et al.*, 2010).

Indulgence dipahami sebagai kecenderungan untuk memuaskan kebutuhan dasar manusia yang bersifat alami, berkaitan dengan menikmati hidup. Kebalikan dari *indulgence* adalah *restraint*. *Restraint* menunjukkan bahwa keinginan memuaskan keinginan perlu diatasi dan diatur dengan norma yang ketat. Masyarakat di lingkungan budaya *indulgence* lebih ekspresif dalam mengutarakan pikiran dan perasaan mereka. Nilai 100 menunjukkan nilai *indulgence* tinggi. Nilai 0 menunjukkan nilai *restraint* yang tinggi (Hofstede *et al.*, 2010).

Nilai *power distance* yang tinggi menandakan adanya jarak emosional antara pihak berkuasa dan kurang berkuasa. Pada budaya yang memiliki *power distance* tinggi, jarang terjadi pertukaran pendapat antara pemimpin dan anggota. Jarak emosional yang tinggi mendorong perilaku mengabaikan kelompok kurang berkuasa. Apabila pihak kurang berkuasa merasa terabaikan, maka timbul potensi terkikisnya komitmen terhadap kelompok dan mendorong perilaku oportunistik. Jarak emosional dan perilaku mengabaikan dapat menjadi rasionalisasi dan tekanan bagi pelaku *fraud*, menurut teori segitiga *fraud* oleh Cressey. Penelitian Akanji, 2017; Mihret, 2014; Guritno *et al.*, 2020 menunjukkan hasil positif dalam pengaruh *power distance* dengan risiko *fraud*. Oleh sebab itu, hipotesis yang dikembangkan:

H1. Dimensi budaya *power distance* (PD) berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*.

Nilai *masculinity* yang tinggi menandakan ambisiusitas mencapai kesuksesan yang bersifat material. Ukuran kesuksesan secara materiil adalah kepemilikan kendaraan mewah, rumah mewah, pakaian bermerek, dll. Menurut Nettle (1984) dalam Lying, Cheating, Stealing mengungkapkan karakteristik seorang *fraudster* adalah seseorang yang berkeinginan kuat mencapai kesuksesan dan memiliki kuasa. Keinginan kuat untuk memiliki kesuksesan secara materiil memberikan tekanan kepada pelaku *fraud*. Penelitian Akanji, 2017; Yamen *et al.*, 2019 membuktikan bahwa tingkat *masculinity* tinggi berasosiasi positif dengan risiko *fraud*. Oleh sebab itu, hipotesis yang dikembangkan:

H2. Dimensi budaya *masculinity* (MAS) berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*.

Nilai *indulgence* yang tinggi menunjukkan tindakan ekspresif berkaitan dengan pemuasan keinginan diri dan bersenang-senang. Menikmati hidup dan bersenang-senang

mendorong gaya hidup konsumtif. Menurut Nettle (1984), karakteristik seorang *fraudster* adalah seseorang yang impulsif, mudah beralih perhatiannya, dan tidak menunda kepuasan. Kurangnya kemampuan finansial untuk bersenang-senang dapat memberikan tekanan kepada pelaku *fraud*. Belum banyak penelitian yang menggunakan dimensi *indulgence*. Oleh karena itu, belum terdapat hasil signifikansi yang menunjukkan pengaruh dimensi *indulgence* terhadap risiko *fraud*. Hipotesis yang dikembangkan:

H3. Dimensi budaya *indulgence* (IND) berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*.

Budaya *individualism* menunjukkan fokus dan kepedulian terhadap diri sendiri dan kerabat dekat saja. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki indeks *individualism* tertinggi, yaitu 91. Menurut Chase (2002), sikap individualis di Amerika menunjukkan kemandirian, independensi, komunikasi langsung, dan tidak ragu berkompetisi untuk meraih satu posisi tertentu. Selain itu, Mihret (2014) mengungkapkan bahwa mekanisme kontrol dalam organisasi kontemporer lebih efektif dalam mencegah *fraud* yang dilakukan oleh individu. Transparansi sikap budaya individualis tinggi serta mekanisme kontrol mempersempit kaki segitiga *fraud*, yaitu kesempatan. Penelitian Akanji, 2017; Guritno *et al.*, 2020; Yamen *et al.*, 2019 membuktikan bahwa dimensi *individualism* berasosiasi negatif terhadap risiko *fraud*. Oleh sebab itu, hipotesis yang dikembangkan:

H4. Dimensi budaya *individualism* (IDV) berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*.

Nilai *uncertainty avoidance* yang tinggi dapat ditunjukkan dengan banyaknya hukum dan peraturan tertulis. Budaya *uncertainty avoidance* tinggi merasa terancam dengan situasi tidak pasti. *Fraud* merupakan tindakan ketidakpastian karena dapat diungkap suatu waktu. Singleton & Singleton (2010) menyatakan bahwa kebijakan dan prosedur dalam perusahaan merupakan cara pencegahan *fraud* yang baik. Adanya peraturan dan hukum tertulis dapat mempersempit kesempatan untuk melakukan *fraud*. Penelitian Mihret, 2014; Irawanto, 2018 membuktikan bahwa *uncertainty avoidance* berasosiasi negatif terhadap risiko *fraud*. Oleh sebab itu, hipotesis yang dikembangkan:

H5. Dimensi *uncertainty avoidance* (UA) berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*.

Masyarakat budaya *long-term orientation* berpikir bahwa mereka harus bertinak hati-hati agar tidak mendapat konsekuensi negatif di masa mendatang. Tindakan *fraud* berkonsekuensi negatif di masa depan. Budaya *short-term orientation* membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk masa sekarang. Keinginan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan cepat memberikan tekanan kepada pelaku untuk melakukan *fraud*. Penelitian Irawanto (2018) membuktikan bahwa dimensi *long-term orientation* berpengaruh signifikan terhadap ke-efektifan pencegahan *fraud*. Penelitian Mihret, 2014; Yamen *et al.*, 2019 juga menyatakan bahwa *long-term orientation* berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*. Oleh sebab itu, hipotesis yang dikembangkan:

H6. Dimensi budaya *long-term orientation* (LTO) berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*.

METODE PENELITIAN

Variabel dan Model Penelitian

Berdasarkan perumusan hipotesis sebelumnya, berikut model regresi linier berganda yang diformulasikan:

$$CPI = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 MAS + \beta_3 IND + \beta_4 IDV + \beta_5 UA + \beta_6 LTO + e$$

Yaitu,

CPI = *Corruption Perception Index* 2020 sebagai proksi risiko *fraud*

β_0 = Konstanta

β_1 - β_6 = Perubahan CPI yang berasosiasi dengan perubahan nilai variabel independen

PD = Nilai indeks dimensi *Power Distance*



- MAS = Nilai indeks dimensi *Masculinity*
- IND = Nilai indeks dimensi *Indulgence*
- IDV = Nilai indeks dimensi *Individualism*
- UA = Nilai indeks dimensi *Uncertainty Avoidance*
- LTO = Nilai indeks dimensi *Long-Term Orientation*
- e = Error (prediksi nilai residu)

Sampel Data

Terdapat 94 negara sebagai sampel digunakan dalam penelitian ini. Negara-negara tersebut merupakan negara yang sudah diukur dimensi budaya nasional Hofstede dan *Corruption Perception Index 2020* oleh *Transparency International*. Daftar negara yang sudah dinilai dimensi budaya nasional oleh Hofstede dapat dilihat di www.hofstede-insight.com. Dari 116 negara yang telah dinilai, 94 negara memiliki indeks dimensi yang lengkap. Daftar negara yang telah dinilai CPI 2020 dapat dilihat di www.transparency.org. Terdapat 180 negara yang telah diukur CPI, 94 negara beririsan dengan sampel data. Sampel data diambil pada 30 April 2021.

Data dan Pengukuran

Corruption Perception Index 2020 digunakan sebagai proksi risiko *fraud*. Alasan digunakannya proksi yaitu dikarenakan data sesungguhnya dari *fraud* yang sulit didapatkan. Bukti *fraud* sulit ditemukan karena selain tindakan penyembunyian yang menyertai semua penipuan, korban cenderung tidak mempublikasikan *fraud* yang ditemukan (Albrecht *et al.*, 2012). Menurut *Report to the Nation 2020*, korupsi merupakan skema *fraud* yang paling umum terjadi di setiap negara (ACFE, 2020). Korupsi bervariasi di berbagai sektor dan ukuran bisnis. CPI dari *Transparency International* merupakan pengukuran terpercaya dengan jangkauan yang luas. Indeks CPI mengukur persepsi korupsi dengan skala global dan nilai indeks berkisar 0-100. Skala global dan nilai indeks sebanding dengan teori dimensi budaya nasional Hofstede. Oleh sebab itu, CPI dipilih sebagai proksi risiko *fraud*.

Transparency International menggunakan 13 sumber data dari 12 lembaga sebagai sumber dari pengukuran CPI. Lembaga-lembaga yang dimaksud merupakan lembaga yang menangkap para ahli dan eksekutif bisnis tentang sejumlah perilaku korup di sektor publik. Perilaku korup yang dimaksud: penyuapan; pengalihan dana publik; penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi; nepotisme dalam pelayanan sipil; dan penangkapan negara. Skala CPI berkisar antara 0-100. Nilai 0 menggambarkan nilai tertinggi persepsi korupsi di negara tersebut, yaitu risiko *fraud* tertinggi. Sedangkan nilai 100 berarti nilai persepsi korupsi terendah, yaitu risiko *fraud* terendah.

Data variabel independen, yaitu dimensi budaya nasional diambil berdasarkan penelitian Hofstede. Dimensi budaya nasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah PD, IDV, MAS, UA, LTO, dan IND. Hofstede mengembangkan teori mengenai pengaruh budaya terhadap perilaku anggotanya. Nilai-nilai budaya dilihat berdasarkan enam dimensi. Nilai-nilai tersebut didapatkan berdasarkan hasil survei yang kemudian dinyatakan ke dalam bentuk matematis, sehingga menjadi nilai indeks. Hofstede memulai penelitiannya pada tahun 1960-an melalui survei global terhadap pegawai IBM, pegawai perusahaan multinasional. Hofstede kemudian terus mengembangkan teorinya hingga seperti saat ini (Hofstede *et al.*, 2010).

Berikut merupakan daftar sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Negara	PD	IDV	MAS	UA	LTO	IND	CPI
1	Albania	90	20	80	70	61	15	36



(berlanjut)

No	Nama Negara	PD	IDV	MAS	UA	LTO	IND	CPI
2	Algeria	80	35	35	70	26	32	36
3	Angola	83	18	20	60	15	83	27
4	Argentina	49	46	56	86	20	62	42
5	Armenia	85	22	50	88	61	25	49
6	Australia	38	90	61	51	21	71	77
7	Austria	11	55	79	70	60	63	76
8	Azerbaijan	85	22	50	88	61	22	30
9	Bangladesh	80	20	55	60	47	20	26
10	Belarus	95	25	20	95	81	15	47
11	Belgium	65	75	54	94	82	57	76
12	Bolivia	78	10	42	87	25	46	31
13	Bosnia dan Herzegovia	90	22	48	87	70	44	35
14	Brazil	69	38	49	76	44	59	38
15	Bulgaria	70	30	40	85	69	16	44
16	Burkina Faso	70	15	50	55	27	18	40
17	Canada	39	80	52	48	36	68	77
18	Cape Verde	75	20	15	40	12	83	58
19	Chile	63	23	28	86	31	68	67
20	China	80	20	66	30	87	24	42
21	Colombia	67	13	64	80	13	83	39
22	Croatia	73	33	40	80	58	33	47
23	Czech Republic	57	58	57	74	70	29	54
24	Denmark	18	74	16	23	35	70	88
25	Dominican Republic	65	30	65	45	13	54	28
26	Egypt	70	25	45	80	7	4	33
27	El Salvador	66	19	40	94	20	89	36
28	Estonia	40	60	30	60	82	16	75
29	Finland	33	63	26	59	38	57	85
30	France	68	71	43	86	63	48	69
31	Georgia	65	41	55	85	38	32	56
32	Germany	35	67	66	65	83	40	80
33	Ghana	80	15	40	65	4	72	43
34	Greece	60	35	57	100	45	50	50
35	Hong Kong	68	25	57	29	61	17	77
36	Hungary	46	80	88	82	58	31	44
37	Iceland	30	60	10	50	28	67	75
38	India	77	48	56	40	51	26	40
39	Indonesia	78	14	46	48	62	38	37
40	Iran	58	41	43	59	14	40	25
41	Iraq	95	30	70	85	25	17	19
42	Ireland	28	70	68	35	24	65	72
43	Italy	50	76	70	75	61	30	53
44	Japan	54	46	95	92	88	42	74
45	Jordan	70	30	45	65	16	43	49
46	Kazakhstan	88	20	50	88	85	22	38
47	Latvia	44	70	9	63	69	13	57
48	Lebanon	75	40	65	50	14	25	25
49	Libya	80	38	52	68	23	34	17
50	Lithuania	42	60	19	65	82	16	60
51	Luxembourg	40	60	50	70	64	56	80
52	Malaysia	100	26	50	36	41	57	51
53	Malta	56	59	47	96	47	66	53
54	Mexico	81	30	69	82	24	97	31



No	Nama Negara	PD	IDV	MAS	UA	LTO	IND	CPI
55	Moldova	90	27	39	95	71	19	34
56	Montenegro	88	24	48	90	75	20	45
57	Morocco	70	46	53	68	14	25	40
58	Mozambique	85	15	38	44	11	80	25
59	Netherlands	38	80	14	53	67	68	82
60	New Zealand	22	79	58	49	33	75	88
61	Nigeria	80	30	60	55	13	84	25
62	North Macedonia	90	22	45	87	62	35	35
63	Norway	31	69	8	50	35	55	84
64	Pakistan	55	14	50	70	50	0	31
65	Paraguay	70	12	40	85	20	56	28
66	Peru	66	16	42	87	25	46	38
67	Philippines	94	32	64	44	27	42	34
68	Poland	68	60	64	93	38	29	56
69	Portugal	63	27	31	99	28	33	61
70	Romania	90	30	42	90	52	20	44
71	Russia	93	39	36	95	81	20	30
72	Sao Tome and Principe	75	37	24	70	32	41	47
73	Saudi Arabia	95	25	60	80	36	52	53
74	Serbia	86	25	43	92	52	28	38
75	Singapore	74	20	48	8	72	46	85
76	Slovakia	100	52	100	51	77	28	49
77	Slovenia	71	27	19	88	49	48	60
78	South Africa	49	65	63	49	34	63	44
79	South Korea	60	18	39	85	100	29	61
80	Spain	57	51	42	86	48	44	62
81	Sweden	31	71	5	29	53	78	85
82	Switzerland	34	68	70	58	74	66	85
83	Taiwan	58	17	45	69	93	49	65
84	Tanzania	70	25	40	50	34	38	38
85	Thailand	64	20	34	64	32	45	36
86	Trinidad and Tobago	47	16	58	55	13	80	40
87	Turkey	66	37	45	85	46	49	40
88	Ukraine	92	25	27	95	86	14	17
89	United Kingdom	35	89	66	35	51	69	77
90	United States	40	91	62	46	26	68	67
91	Uruguay	61	36	38	98	26	53	71
92	Venezuela	81	12	73	76	16	100	15
93	Vietnam	70	20	40	30	57	35	36
94	Zambia	60	35	40	50	30	42	33

Sumber: PD, IDV, MAS, UA, LTO, IND didapat dari www.hofstede-insight.com. Sedangkan CPI didapatkan dari www.transparency.org. Keduanya diakses pada 30 April 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan daftar sampel yang ditunjukkan dalam Tabel I, maka dibuatlah rangkuman statistik. Statistik deskriptif memuat data jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai tengah, dan nilai deviasi standar. Informasi tersebut menjadi bahan analisis untuk memperoleh informasi mengenai persebaran data dan pusat data. Pusat data dapat dilihat dengan membandingkan nilai tengah dengan nilai rata-rata. Apabila nilai rata-rata lebih tinggi daripada nilai tengah, maka pusat data berada di rentang tinggi. Sebaliknya, nilai rata-rata yang lebih rendah daripada nilai tengah, maka pusat data berada di rentang rendah.

Persebaran data dapat dilihat melalui perbandingan nilai deviasi standar dan rata-rata. Selisih antara nilai deviasi standar dan rata-rata menunjukkan rentang persebaran data.

Tabel II menunjukkan statistik deskriptif data penelitian ini. Variabel CPI, IDV, LTO, dan IND memiliki pusat data pada rentang tinggi. Artinya, sampel data pada variabel-variabel tersebut cenderung bernilai tinggi. Sedangkan variabel PD, MAS, dan UA memiliki pusat data pada rentang rendah. Hal tersebut menandakan sampel data pada variabel-variabel tersebut cenderung bernilai rendah. Secara umum, persebaran data pada setiap variabel adalah merata.

Tabel II
Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Median	Deviasi Standar
CPI	94	49,979	88	15	44,5	19,568
PD	94	66,117	100	11	68	20,478
IDV	94	39,543	91	10	31	22,079
MAS	94	47,511	100	5	48	18,588
UA	94	68,117	100	8	70	20,995
LTO	94	45,543	100	4	44,5	24,159
IND	94	45,128	100	0	43,5	22,616

Sumber: Data yang diolah, 2021

Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan uji regresi. Uji asumsi klasik bertugas memastikan data layak untuk uji regresi. Penelitian ini melakukan uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji normalitas dilakukan untuk memverifikasi apakah variabel residual berdistribusi normal dalam model regresi. Uji normalitas dilakukan dengan metode kolmogorov-smirnov. Uji heterokedastisitas bertujuan mengetahui ada tidaknya kesamaan varians antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan metode glejser. Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi menemukan korelasi antar variabel independen. Uji multikolienaritas dilakukan dengan metode VIF (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data penelitian dinyatakan layak untuk pengujian regresi.

Tabel III
Uji Asumsi Klasik

Objek Uji	Signifikan	Nilai Toleransi	VIF	Sig. Unstandardized Residual
PD	0,254	0,423	2,366	
IDV	0,908	0,459	2,181	
MAS	0,974	0,951	1,051	
UA	0,268	0,874	1,144	
LTO	0,724	0,717	1,395	
IND	0,998	0,662	1,511	
Asymp. Sig.				0,200

Sumber: *Output IBM SPSS 25, Data yang diolah 2021*

Uji Regresi

Model regresi yang dilakukan adalah model regresi linier berganda. Uji regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, variabel independen yang ingin diketahui kontribusi pengaruhnya adalah dimensi budaya nasional, yaitu: PD, IDV, MAS, UA, LTO, dan IND. Uji regresi yang dilakukan adalah uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t.

Tabel IV
Uji Regresi

Objek Uji	Adj. R Square	F	Beta	t	Sig.
Model	0,652				
Regression		30,042			0,000
CPI			58,846	5,652	0,000
PD			-0,411	-4,571	0,000
IDV			0,224	2,798	0,006
MAS			-0,135	-2,040	0,044
UA			-0,092	-1,510	0,135
LTO			0,306	5,237	0,000
IND			0,172	2,640	0,010

Sumber: Output IBM SPSS 25, Data yang diolah 2021

Model regresi dapat menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen yang ada sebanyak 65,2%. Variabel independen secara simultan/bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung 30,042 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,20. Uji statistik t ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Nilai t hitung adalah 1,987. Batas signifikan yang ditentukan adalah 5% atau 0,005. Apabila variabel independen memiliki nilai t hitung lebih tinggi dari nilai t tabel dan signifikansi di bawah 0,005, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H1. Dimensi budaya *power distance* (PD) berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*. Hipotesis diterima.

H2. Dimensi budaya *masculinity* (MAS) berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*. Hipotesis diterima.

H3. Dimensi budaya *indulgence* (IND) berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*. Hipotesis ditolak. IND berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*.

H4. Dimensi budaya *individualism* (IDV) berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*. Hipotesis diterima.

H5. Dimensi budaya *uncertainty avoidance* (UA) berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*. Hipotesis ditolak. UA memiliki nilai t hitung lebih rendah dari nilai t tabel ($1,510 < 1,987$) dan signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05 ($0,135 > 0,05$).

H6. Dimensi budaya *long-term orientation* (LTO) berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*. Hipotesis diterima.

Pembahasan

Kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* semakin parah setiap tahunnya. *Fraud* merupakan tindak kriminal yang merugikan berbagai pihak, baik secara finansial maupun non finansial. Usaha pemberantasan *fraud* sudah dilakukan sejak lama. Cara memberantas *fraud* yang paling *cost-effective* adalah dengan tindakan pencegahan. Program anti-*fraud* sudah banyak dikembangkan di berbagai perusahaan. Program ini melingkupi upaya pencegahan dan deteksi *fraud*. Program tersebut dibuat berdasarkan risiko yang ada pada perusahaan. Oleh sebab itu, informasi risiko *fraud* yang holistik diperlukan. Penelitian ini menjelaskan hubungan budaya dengan risiko *fraud*. Budaya mempengaruhi seluruh aspek

kehidupan masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan mempengaruhi risiko *fraud* juga. Berdasarkan hasil pengujian, aspek budaya mempengaruhi risiko *fraud* secara bersama-sama, yaitu sebesar 30,042. PD, MAS, IDV, dan LTO memberikan pengaruh kepada risiko *fraud* secara signifikan. IND memberikan pengaruh signifikan terhadap risiko *fraud* tetapi dengan arah yang tidak sesuai dengan prediksi. UA tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap risiko *fraud*.

Hasil pengujian telah membuktikan bahwa PD berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*. Nilai PD yang tinggi menggambarkan adanya jarak emosional dan koordinasi antar kelompok yang lebih berkuasa dan kelompok kurang berkuasa. Perbedaan ini dapat mengurangi transparansi antar kelompok karena kurangnya pertukaran ide. Selain itu, PD cenderung membuat efek terabaikan terhadap kelompok yang kurang berkuasa. Kelompok yang terabaikan terus-menerus akan mengalami pengikisan komitmen terhadap kelompoknya sehingga menciptakan perilaku oportunistik. Sedangkan kelompok yang berkuasa cenderung bersifat eksklusif. Dengan adanya tekanan yang mendorong *fraud*, kelompok berkuasa dapat bekerjasama dalam melakukan *fraud* seperti korupsi dan *fraud* laporan keuangan. Sifat ke-eksklusivitas dari kelompok berkuasa dapat menjadi rasionalisasi bagi mereka, yaitu sulit ketahuan. Baik kelompok yang berkuasa maupun kelompok kurang berkuasa memiliki potensi menjadi pelaku *fraud* dalam tatanan masyarakat struktural ketat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Akanji, 2017; Mihret, 2014; Guritno *et al.*, 2020.

MAS berpengaruh positif terhadap risiko *fraud*. Nilai MAS yang tinggi menggambarkan ambisiusitas masyarakat budaya tersebut untuk meraih kesuksesan bersifat material. Ambisiusitas tinggi pekerja memberikan tekanan untuk berhasil dalam pekerjaannya. Tekanan tersebut dapat mendorong pekerja untuk menghalalkan segala cara untuk meraih hasilnya. Sedangkan ambisiusitas tinggi pada budaya perusahaan dapat menimbulkan lingkungan kerja yang penuh tekanan. Tujuan perusahaan yang ambisius dan tidak disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dapat mendorong terjadinya *fraud*. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Nettle (1984) dan Singleton & Singleton (2010). Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Akanji (2017) dan Yamen *et al.* (2019).

Koefisien IND yang bersifat positif merupakan hal menarik. Teori dan kerangka pikir yang digunakan dalam mengembangkan hipotesis menunjukkan pengaruh negatif terhadap risiko *fraud*. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IND memberi pengaruh positif terhadap CPI. IND berkaitan dengan pemuasan keinginan dan dorongan alami untuk menikmati hidup. Masyarakat budaya IND tinggi cenderung berani mengekspresikan diri sendiri sehingga mengurangi tekanan dan lebih berpikir optimis (Hofstede *et al.*, 2010). Menurut Cressey, dalam Singleton & Singleton (2010), alasan seseorang melakukan *fraud* adalah karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Budaya masyarakat IND mampu mengurangi tekanan sehingga dapat mengurangi alasan seseorang melakukan *fraud*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Amalia & Handayani (2019).

IDV berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud*. IDV yang tinggi menunjukkan kemandirian dan independensi, serta hanya berfokus pada diri sendiri dan kerabat dekat. Nilai IDV yang rendah menunjukkan adanya budaya kolektivisme dalam masyarakat tersebut. Budaya kolektivisme merupakan budaya yang mengutamakan kepentingan kelompok dari pada kepentingan individu. Perilaku saling mementingkan kepentingan umum ini membangun tatanan masyarakat yang *solid*. Imbalan dari melindungi kelompok adalah loyalitas yang kuat (Hofstede *et al.*, 2010). Akan tetapi, loyalitas tinggi ini dapat mengarah ke perlindungan pelaku *fraud*. Loyalitas kelompok mampu untuk menutupi dan membenarkan perilaku anggotanya, meskipun telah melakukan tindakan yang salah. Tindakan *fraud* yang dilakukan secara bersama-sama lebih sulit ditangkap oleh pihak terkait (Mihret, 2014). Oleh sebab itu, budaya kolektivitas meningkatkan potensi *fraud*. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Akanji, 2017; Guritno *et al.*, 2020; Yamen *et al.*, 2019.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa UA tidak memberi pengaruh terhadap risiko *fraud*. Terlebih lagi, arah koefisien UA adalah negatif terhadap CPI. Akan tetapi, terdapat teori yang menjelaskan sebaliknya. Hofstede *et al.* (2010) menyatakan bahwa masyarakat dalam budaya UA tinggi merasa terancam atas ambiguitas. Aturan dan hukum yang dibuat merupakan cara mengatasi ambiguitas, Hukum bersifat memaksa dan penegak hukum dapat memberikan sanksi kepada pelanggar. *Fraud* merupakan tindakan kriminal dan melawan hukum. Penegak hukum berhak memberikan sanksi dan hukuman kepada pelaku *fraud*. Penelitian Rizky & Fitri (2017) membuktikan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap tingkat terjadinya *fraud* akuntansi. Semakin tegaknya hukum, maka *fraud* akuntansi semakin berkurang. Menurut Singleton & Singleton (2010), kebijakan dan prosedur yang mengandung pencegahan *fraud* akan memperkecil kesempatan melakukan *fraud*.

LTO memberikan pengaruh negatif terhadap risiko *fraud*. LTO yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat budaya tersebut memikirkan konsekuensi mendatang dari tindakannya. Budaya ini menumbuhkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Setiap pribadi berusaha menghindari konsekuensi negatif dari tindakannya. Hofstede *et al.* (2010) menyebutkan bahwa masyarakat budaya ini cenderung mengutamakan nilai kejujuran, akuntabilitas, dan memiliki tujuan jangka panjang dalam pekerjaan. Tindakan *fraud* memiliki konsekuensi negatif dan tidak menjamin keuntungan jangka panjang sehingga masyarakat menghindarinya. Oleh sebab itu, LTO memiliki pengaruh menurunkan risiko *fraud*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya nasional berupa: *power distance*, *masculinity*, *indulgence*, *individualism*, *uncertainty avoidance*, dan *long-term orientation* terhadap risiko *fraud*. Sampel penelitian adalah negara-negara yang telah diukur indeks budaya nasional dan CPI 2020. Data berasal dari sumber sekunder yaitu berasal dari www.transparency.org dan www.hofstede-insight.com yang diakses pada 30 April 2021. Melalui sumber tersebut, didapat 94 negara sebagai sampel penelitian ini. Proses pengumpulan data, pengolahan, pengujian, dan interpretasi telah dilakukan. Hasil menunjukkan bahwa dimensi budaya *power distance* dan *masculinity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko *fraud*. Semakin tinggi nilai *power distance* dan *masculinity* maka risiko *fraud* semakin tinggi. Dimensi budaya *long-term orientation* dan *individualism* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko *fraud*. Semakin tinggi nilai *long-term orientation* dan *masculinity* maka semakin rendah risiko *fraud*. Dimensi budaya *indulgence* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko *fraud*, tidak sesuai dengan hipotesis. Dimensi budaya *uncertainty avoidance* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap risiko *fraud*.

Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel. Jumlah sampel bergantung pada ketersediaan data. Pada 2021, terdapat 116 negara yang sudah diukur dimensi budaya nasional oleh Hofstede dan 180 negara yang sudah diukur CPI 2020 oleh *Transparency International*. Akan tetapi, hanya 94 negara yang memiliki informasi yang lengkap. Selain itu, model penelitian ini belum mampu menjelaskan sepenuhnya hal-hal apa saja yang mempengaruhi risiko *fraud*. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil uji koefisien determinasi, yaitu 65,2%. Artinya, masih terdapat 34,8% variabel lain selain dimensi budaya nasional yang mempengaruhi risiko *fraud*. Peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik ini dapat menambahkan variabel lain di luar budaya untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi risiko *fraud*.



REFERENSI

- Akanji, B. (2017). The Relationship between Culture and Corruption in Nigeria – Prospecting Culture Change in Dealing with this ‘Big Black Hole.’ *The Romanian Economic Journal*, 20(63), 3–18.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination* (O. Mason (ed.)). Mason.
- Amalia, N., & Handayani, R. S. (2019). Budaya Nasional Dan Risiko Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 360. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9638>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2020). Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2020 global fraud study. In *Acfe*.
- Chase, M. (2002). Communication between cultures (4th ed.). In *International Journal of Intercultural Relations* (Vol. 26, Issue 3). [https://doi.org/10.1016/s0147-1767\(02\)00007-x](https://doi.org/10.1016/s0147-1767(02)00007-x)
- Getie Mihret, D. (2014). National culture and fraud risk: exploratory evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), 161–176. <https://doi.org/10.1108/jfra-10-2012-0049>
- Ghozali, P. H. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Guritno, D. C., Kurniawan, M. L. A., Mangkunegara, I., & Samudro, B. R. (2020). Is there any relation between Hofstede’s cultural dimensions and corruption in developing countries? *Journal of Financial Crime*, 6. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0115>
- Gwynn Nettler. (1984). Lying, Cheating, Stealing. *Social Forces*, 63(1), 293–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/sf/63.1.293>
- Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede, M. M. (2010). Culture and Organizations. In *International Studies of Management & Organization* (3rd ed., Vol. 10, Issue 4). McGraw Hill. <https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300>
- Hofstede Insight (2021), "Compare Countries" tersedia di <https://www.hofstede-insight.com/compare-countries/> (diakses pada 30 April 2021)
- House, R., Javidan, M., Hanges, P., & Dorfman, P. (2002). Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: An introduction to project GLOBE. *Journal of World Business*, 37(1), 3–10. [https://doi.org/10.1016/S1090-9516\(01\)00069-4](https://doi.org/10.1016/S1090-9516(01)00069-4)
- Irawanto, D. W. (2018). Does Culture Matter in Fraud Prevention Behavior? National Culture Based Study of Indonesian Bankers. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), 486–495. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2139>
- Kaptein, M., & Schwartz, M. S. (2008). The effectiveness of business codes: A critical examination of existing studies and the development of an integrated research model. *Journal of Business Ethics*, 77(2), 111–127. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9305-0>
- Pusdiklatawas, B. (2002). *Fraud Auditing*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 10–20.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). Wiley.
- Sunyoto, D., & Harisa, W. (2017). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. 98.
- Sutherland, E. H. (1940). White Collar Criminality. *American Sociological Review*, 5, 1–12.
- Tuanakotta, T. M. (2015). *Audit Kontemporer*. Salemba Empat.



- Transparency International (2021), "Corruption Perceptions Index 2020" tersedia di <https://www.transparency.org/cpi2020/results/> (diakses pada 30 April 2021)
- Yamen, A., Al Qudah, A., Badawi, A., & Bani-Mustafa, A. (2019). The impact of national culture on financial crime. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 373–387. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0004>
- Akanji, B. (2017). The Relationship between Culture and Corruption in Nigeria – Prospecting Culture Change in Dealing with this ‘Big Black Hole.’ *The Romanian Economic Journal*, 20(63), 3–18.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination* (O. Mason (ed.)). Mason.
- Amalia, N., & Handayani, R. S. (2019). Budaya Nasional Dan Risiko Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 360. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9638>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2020). Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2020 global fraud study. In *Acfef*.
- Chase, M. (2002). Communication between cultures (4th ed.). In *International Journal of Intercultural Relations* (Vol. 26, Issue 3). [https://doi.org/10.1016/s0147-1767\(02\)00007-x](https://doi.org/10.1016/s0147-1767(02)00007-x)
- Getie Mihret, D. (2014). National culture and fraud risk: exploratory evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), 161–176. <https://doi.org/10.1108/jfra-10-2012-0049>
- Ghozali, P. H. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Guritno, D. C., Kurniawan, M. L. A., Mangkunegara, I., & Samudro, B. R. (2020). Is there any relation between Hofstede’s cultural dimensions and corruption in developing countries? *Journal of Financial Crime*, 6. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0115>
- Gwynn Nettler. (1984). Lying, Cheating, Stealing. *Social Forces*, 63(1), 293–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/sf/63.1.293>
- Hofstede, Geert , Gert Jan Hofstede, M. M. (2010). Culture and Organizations. In *International Studies of Management & Organization* (3rd ed., Vol. 10, Issue 4). Mc Graw Hill. <https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300>
- House, R., Javidan, M., Hanges, P., & Dorfman, P. (2002). Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: An introduction to project GLOBE. *Journal of World Business*, 37(1), 3–10. [https://doi.org/10.1016/S1090-9516\(01\)00069-4](https://doi.org/10.1016/S1090-9516(01)00069-4)
- Irawanto, D. W. (2018). Does Culture Matter in Fraud Prevention Behavior? National Culture Based Study of Indonesian Bankers. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), 486–495. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2139>
- Kaptein, M., & Schwartz, M. S. (2008). The effectiveness of business codes: A critical examination of existing studies and the development of an integrated research model. *Journal of Business Ethics*, 77(2), 111–127. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9305-0>
- Pusdiklatawas, B. (2002). *Fraud Auditing*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 10–20.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). Wiley.
- Sunyoto, D., & Harisa, W. (2017). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. 98.
- Sutherland, E. H. (1940). White Collar Criminality. *American Sociological Review*, 5, 1–12.
- Tuanakotta, T. M. (2015). *Audit Kontemporer*. Salemba Empat.



Yamen, A., Al Qudah, A., Badawi, A., & Bani-Mustafa, A. (2019). The impact of national culture on financial crime. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 373–387.
<https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0004>